

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI OPSI PENANGGULANGAN RADIKALISME

Jihan Khairunnisa

Universitas Medan Area, Indonesia

Email: jihan_k@gmail.com

Virgie Alminayu

Universitas Medan Area, Indonesia

Email: Virgie_al@gmail.com

Nursyam Fatimah

Universitas Medan Area, Indonesia

Email: fatimah_nursaym@gmail.com

Abstrak: Kemajemukan budaya (multikultur) adalah realitas bangsa Indonesia yang harus disikapi secara bijak. Sifat dasar dari kemajemukan adalah adanya potensi integratif dan potensi disintegratif. Kajian ini merupakan upaya untuk menganalisis dua di antara sejumlah isu yang berkaitan dengan multikulturalisme yaitu agama dan etnisitas dan kaitannya dengan radikalisme. Sejumlah kasus konflik di Indonesia, demikian pula di beberapa negara lain, menunjukkan bahwa keragaman agama dan keragaman etnik memiliki potensi disintegratif dan sering kali muncul dalam bentuk tindakan radikal. Didasarkan kepada masalah di atas, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah radikalisme yang dilatarbelakangi oleh paham keagamaan yang eksklusif dan sentimen etnik (*etnisisme*). Agama dipahami oleh pemeluknya sebagai suatu kebenaran tunggal dan dijadikan acuan untuk menilai agama orang lain. Kedua faktor ini merupakan cikal bakal munculnya radikalisme di Indonesia dan di beberapa negara lain. Dalam kajian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research method*) dengan mengkaji referensi-referensi ilmiah berupa buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa radikalisme dimulai dari pemahaman eksklusif atas doktrin-doktrin agama dan sentimen etnik (*etnisisme*) yang membentuk sikap dan tindakan radikal. Karena sifatnya yang demikian, maka radikalisme dapat dicegah, salah satunya dengan membangun kontra narasi radikalisme melalui pendidikan multikultural.

Kata Kunci: *Multikulturalisme; pendidikan; radikalisme.*



PENDAHULUAN

Dalam banyak peristiwa, dapat disaksikan bagaimana kerjasama antar kelompok budaya dilakukan untuk kepentingan bangsa dan untuk tujuan kemanusiaan (Romli, 2015). Misalnya, mobilisasi bantuan rakyat bagi para korban bencana alam, kerjasama di bidang pendidikan bagi anak-anak terlantar, penghimpunan sumbangan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan penghasilan akibat wabah penyakit, penyebaran penduduk ke wilayah luar Jawa pada program transmigrasi, dan sebagainya. Salah satu contoh dapat dikemukakan, misalnya, pada tahun 2016 pemerintah provinsi Jawa Barat mengadakan kerjasama dengan sebelas provinsi di luar Jawa dalam program transmigrasi. Kerjasama dilakukan sebagai upaya saling mengembangkan potensi pembangunan daerah antara daerah yang memiliki kekayaan alam dan daerah yang kaya SDM. Dalam kerjasama ini ada persyaratan bahwa kabupaten pengirim menyediakan calon transmigran yang berkualitas, sedangkan kabupaten penerima menyediakan lahan dan fasilitas lainnya bagi kepentingan transmigran tersebut.

Di sisi lain, perselisihan-perselisihan antar kelompok (konflik sosial) di tengah masyarakat Indonesia kadang masih terjadi. Misalnya konflik antar Suku Dayak dan Suku Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001, konflik antar suku di Lampung Tengah antara suku asli dan pendatang, konflik antar suku di Papua antara suku Dani dan suku Moni pada tahun 2014, konflik antar suku Di Lampung Selatan pada tahun 2012 antara Suku Lampung (suku pribumi) dan Suku Bali. Dari kasus-kasus tersebut, tampak bahwa sentimen etnisisme masih ada pada kelompok-kelompok budaya di Indonesia, dan itu merupakan ancaman bagi keutuhan NKRI.

Selain itu, konflik berlatar agama juga masih sering terjadi di Indonesia. Sebut saja misalnya, konflik antar pemeluk agama di Tolikara, Kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil, konflik bernuansa SARA di Lampung Selatan, konflik di Situbondo, dan konflik agama di Ambon, yang hingga kini masih menyisakan luka dan kerugian materil di semua kelompok yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki potensi disintegratif atau potensi konflik, meski setiap pemeluk agama selalu meyakinkan semua orang bahwa agama itu pembawa kerukunan, kedamaian, dan rahmat, dan bukan penyebab konflik.

Konflik-konflik di atas dipengaruhi oleh banyak aspek, tetapi semuanya muncul dalam bentuk aksiaksi dan tindakan radikal, suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menginginkan



perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem dengan mengabaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal: (1) intoleran, (2) fanatik, (3) eksklusif dan (4) revolusioner.

Kasus-kasus konflik antar etnik dan antar kelompok agama, seperti digambarkan di atas mengindikasikan masih adanya ancaman disintegrasi bangsa di tengah-tengah upaya menciptakan kerukunan antar kelompok agama dan antar kelompok etnik demi keutuhan NKRI. Jika kasus-kasus tersebut diabaikan, maka mereka bisa mengarah kepada disintegrasi bangsa. Ini tentu tidak dikehendaki oleh semua pihak yang berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu, harus dimunculkan alternatif-alternatif pemecahan atas masalah di atas melalui berbagai upaya oleh semua pihak.

Salah satu upaya untuk meningkatkan potensi integratif dan mereduksi potensi radikalisme pada kelompok-kelompok etnik dan kelompok agama di Indonesia adalah dengan memobilisasi SDM terdidik (*educated human resources*), khususnya mereka yang menempuh jenjang perguruan tinggi dan para lulusannya. Mereka adalah modal SDM (*human capital*) yang dapat menjadi agen-agen perubahan sosial di lingkungan sosialnya dan diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Kini, semakin banyak penduduk dari daerah-daerah terpencil di pelosok tanah air yang menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi di berbagai kota besar di Indonesia, paling banyak ke Jawa. Pada saatnya kelak, setelah mereka menjadi sarjana dan kembali ke daerah asalnya, mereka dapat menyebarkan ilmunya dan membagi pengalamannya ketika berada di kota-kota yang lebih maju tempat mereka belajar dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar sosial budaya. Dengan berbagi pengalaman tersebut, diharapkan anggota masyarakat di mana mereka tinggal menjadi lebih terbuka terhadap keberadaan kelompok masyarakat lain yang berbeda latar sosial budaya dan agamanya.

Uraian di atas menjelaskan posisi penting segmen masyarakat terdidik sebagai agen-agen perubahan yang dapat memperkenalkan kekayaan budaya dan eksistensi beragam pemeluk agama bangsa Indonesia. Untuk itu, kajian tentang pengenalan keragaman budaya (*cultural diversity*) dan keberagaman agama (*religious diversity*) menjadi menarik dilihat dari peluangnya sebagai upaya untuk mengikis paham, sikap, dan tindakan radikal, baik yang



disebabkan oleh perbedaan agama maupun aspek kebudayaan lainnya. Sebaliknya, keragaman budaya dan agama justru harus menjadi modal untuk membangun kerjasama antar kelompok agama dan budaya yang berbeda agar mencapai sinergi. Lebih jauh, perlu diberikan pembekalan kepada para mahasiswa dari latar etnik dan dari pemeluk agama yang berbeda agar sekembalinya ke daerah asal, mereka dapat mengembangkan masyarakatnya berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan kelompok agama dan kelompok budaya berbeda tersebut untuk tujuan-tujuan yang produktif.

LANDASAN TEORI

Primordialisme sebagai Akar Radikalisme

Bagian ini diawali dengan kajian atas dua macam gerakan radikal, yaitu gerakan yang mengatasnamakan agama dan gerakan yang berbasis etnisitas, kesukuan, atau kedaerahan. Gerakan yang pertama biasanya disebut sebagai gerakan radikal keagamaan. Anggota gerakan tersebut mengklaim tindakannya atas nama agama, meskipun pemeluk yang lain dari agama yang sama tidak menyetujuinya, atau bahkan menentangnya, ISIS dan NII ialah di antara contoh yang dapat disebut. Jenis yang kedua biasanya langsung menyebut etnik atau daerahnya.

Ada sejumlah faktor kemunculan gerakan radikal yang mengatasnamakan agama. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal. Faktor internal dilandasi oleh kondisi internal umat beragama yang, menurut pandangan kelompok radikal, telah dilanda penyimpangan norma-norma keagamaan dan adanya pemeluk yang cenderung meninggalkan agama dan hidup tanpa Tuhan. Kondisi ini mendorong munculnya gerakan untuk kembali kepada otentisitas (*fundamental*) agama atau membentuk agama baru dengan sikap totalistik dan formalistik. Sedangkan faktor eksternal menyangkut lebih banyak aspek, termasuk di dalamnya faktor kekuasaan, krisis kepemimpinan nasional, krisis penegakan hukum, keadilan, ekonomi, kedaulatan negara, kesenjangan pusat dan daerah, dan hegemoni negara adikuasa.

Setiap tindakan keagamaan (*religious action*) akan didasarkan kepada kerangka pemikiran dan pemahaman keagamaan yang dianut atau diikuti seseorang. Pemahaman inilah yang menjadi acuan atau rujukan bagi setiap tindakan seseorang atau gerakan dari suatu kelompok. Terdapat hubungan positif antara pemahaman seorang pemeluk agama dengan sikap, dan



tindakan keagamaannya. Adanya kesamaan pemahaman, sikap, dan tindakan sejumlah pemeluk akan membentuk kolektivitas umat yang diikat oleh sentimen keagamaan mereka. Pada gilirannya, kolektivitas umat juga membentuk dan mempengaruhi perkembangan pemikiran keagamaan seseorang yang kemudian berimplikasi pada tindakan keagamaannya.

Mengacu kepada teori Wach (1958), maka kasus-kasus gerakan radikal keagamaan maupun gerakan radikal etnik dapat ditelusuri dari doktrin-doktrin agama dan dari sentimen etnik yang mendasarinya. Dalam setiap agama dikenal doktrin yang membentuk pemikiran keagamaan setiap pemeluknya. Dalam Islam ada doktrin Tuhan Esa (*Unitary Faith*) dan kesaksian manusia tentang Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad sebagai Utusan Tuhan (syahadat), yang disusul dengan rukun-rukun lainnya yang tercakup dalam Rukun Iman dan Rukun Islam. Dalam Kristen dikenal doktrin Trinitas (*Trinity Faith*), dosa waris, penghakiman, dan lain-lain. Agama-agama lainnya mempunyai doktrin teologisnya masing-masing. Semua doktrin tersebut diyakini sepenuhnya dan menjadi dasar dari keberagaman (*religiuitas*) seseorang.

Doktrin teologis pada setiap agama maupun sentimen kekelompokan atau kesukuan (*etnisisme*) telah membentuk pemikiran para anggotanya dan menjadi acuan untuk menunjukkan sikap (*attitude*) dan melakukan tindakan (*action*). Tindakan-tindakan yang didasari oleh sikap dan pemikiran, baik agama maupun etnisisme, dilakukan dalam kerangka klaim kebenaran subjektif, keunggulan, dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain, penguasaan akses ekonomi dan wilayah, dan sekurang-kurangnya untuk menjaga eksistensi kelompok dan anggotanya dari segala kemungkinan ancaman kemusnahan. Untuk itu ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota, dari mulai tindakan damai dan berorientasi kerjasama dan membangun sumber daya, sampai kepada bentuk yang paling beresiko yaitu peperangan. Sikap dan tindakan seperti itu dibingkai oleh sebuah konsep agama yang disebut jihad atau perang suci (*holy war*). Jadi, radikalisme keagamaan diyakini oleh pelakunya sebagai sebuah tugas suci yang bernilai tinggi.

Psikolog Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan, “radikal” adalah sikap, yaitu suatu perasaan (*afeksi*) yang positif terhadap segala yang serba ekstrem, sampai ke akar-akarnya. Sikap ini akan menimbulkan motivasi dan perilaku ke arah membela mati-matian apa yang dianggapnya sebagai nilai-nilai yang paling mendasar dari suatu keyakinan, kepercayaan, ideologi, atau



agama. Radikalisme agama bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal agresif yang bisa mengancam keselamatan orang lain maupun dirinya sendiri. Mengacu kepada pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu tindakan yang tidak didasarkan kepada suatu sikap, dan sikap dibentuk oleh doktrin, pemikiran, atau keyakinan. Pemaknaan dan interpretasi atas doktrin-doktrin dari suatu keyakinan, baik agama maupun etnisisme, menjadi dasar, alasan, atau latar dari sebuah sikap yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan.

Faktor kedua, yaitu faktor eksternal, menyangkut lebih banyak aspek yang dipandang sebagai ancaman. Di sana ada ideologi tandingan yang mengancam ideologi yang dianut kelompok, ada kekuatan ekonomi dan kekuasaan atau politik, dan ada kekuatan militer. Horace M. Kallen menjelaskan bahwa radikalisme paling tidak ditandai oleh tiga kecenderungan umum: Pertama, ia merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, baik dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Kedua, radikalisme berupaya mengganti tatanan yang berlaku dengan bentuk tatanan lain. Ketiga, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran ideologi mereka yang dibarengi dengan penafian kebenaran dari sistem lain. Kuatnya keyakinan ini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.

Modernisasi adalah faktor eksternal lainnya yang turut melemahkan tradisi agama yang telah mapan, sehingga agama menjadi longgar dan peran formal agama dan institusi-institusinya cenderung melemah dan memudar. Kelompok radikal lebih banyak melihat dampak negatif modernisasi dibanding dampak positifnya. Modernisasi sering dikaitkan dengan proses pembaratan (*westernisasi*), sekularisme, dan globalisasi. Oleh karena itu, ketika menghadapi modernisasi, maka terlihat disitu *westernisasi*, sekularisme, dan globalisasi. Sekularisasi dan globalisasi diyakini mengancam eksistensi dan identitas kelompok agama dan kelompok etnik. Ketidakmampuan menghadapi keduanya mendorong munculnya tindakan untuk mempertahankan diri dari ancaman kemusnahan akibat gerusan modernisasi.

Kontra Narasi Radikalisme Agama dan Etnik

Dengan semakin majunya teknologi komunikasi dan informasi dan semakin berkembangnya media media daring (online), kini proses radikalisme tidak hanya dilakukan melalui rekrutmen calon anggota secara langsung



untuk diberi pendidikan dan pelatihan, akan tetapi sudah dilakukan melalui media daring. Bukti mencatat, Al Qaeda menerbitkan sekitar 4.500 situs website jihadis dalam menyebarkan pesannya dan untuk merekrut anggota baru. Penggunaan media internet mengalami pergeseran di masa sekarang, bergeser dari World Wide Web (*website*) ke media sosial, seperti Facebook, YouTube, dan Twitter untuk pengiriman pesan dan komunikasi, namun jihad elektronik berbasis internet tetap menjadi katalisator yang signifikan untuk mempromosikan aktivitas radikalisme dan untuk memfasilitasi operasi terorisme. Media internet paling banyak digunakan karena memberikan interkoneksi, anonimitas sekaligus mudah dan murah.

Teks keagamaan juga menegaskan janji-janji masa depan (*eschatological promises*). Pemeluk dijanjikan dengan suatu kehidupan yang lebih baik di masa depan, yaitu suatu kehidupan setelah kematian. Dengan melakukan pertobatan, diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang lebih baik, maka ia akan memperoleh kehidupan surgawi. Janji-janji ini amat ditekankan dan diyakinkan oleh para pemimpin agama mereka dengan mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan teks keagamaan. Secara psikologis janji ini akan memotivasi seorang pemeluk untuk melakukan tindakan-tindakan keagamaan sebagaimana yang diyakininya.

Faktor lainnya adalah sejarah. Sejarah agama-agama sering menggambarkan kejayaan suatu agama di suatu masa. Masa-masa kejayaan tersebut sering dikenang dan dibanggakan serta menjadi rujukan bagi pengikut agama sekarang untuk menjadikan masa-masa itu sebagai contoh yang harus diwujudkan kembali. Dengan melihat dan mengenang kejayaan itu, pengikut membandingkannya dengan masa sekarang secara subjektif dengan melihat keunggulan dan kehebatan masa lampau dengan kekurangan dan keburukan masa kini. Pada gilirannya, kemudian pengikut diajak untuk mewujudkan kembali kejayaan masa lalu itu dengan meninggalkan dan mengganti sistem dan tatanan kemasyarakatan masa kini dengan kondisi ideal yang digambarkan dalam sejarah agama mereka. Kelompok radikal menghendaki perubahan tersebut secara cepat dan dengan cara kekerasan, sehingga mengancam sistem dan tatanan sosial yang tengah berlaku.

Upaya-upaya yang sejalan dengan tujuan yang sama, yaitu membangun hamoni sosial di tengahnya masyarakat multi-etnik, dapat dilakukan dengan membangun kontra narasi radikalisme etnik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan mempelajari sejarah kehidupan suatu kelompok etnik, mempelajari nilai-nilai yang dianut (*local*



wisdom), dan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh adat. Menurut Fredrik Barth, mempertahankan batas etnik akan terjadi dengan sendirinya akibat adanya faktor-faktor isolasi seperti perbedaan ras, budaya, sosial, dan bahasa. Tiap-tiap kelompok etnik mengembangkan budaya dan bentuk sosialnya dalam kondisi terisolasi yang disebabkan oleh faktor ekologi setempat yang mendorong berkembangnya kondisi adaptasi dan daya cipta dalam kelompok tersebut. Richard D. Alba juga menyebutkan bahwa ciri umum sebuah kelompok etnik adalah perhatiannya terhadap masalah politik tertentu, khususnya yang berkaitan dengan wilayah; lembaga-lembaga sosial, dan suatu kesadaran terhadap keberbedaan dari kelompok yang lain.

Dari penjelasan Barth dapat dipahami bahwa sentimen etnisitas adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ia muncul sebagai suatu naluri mempertahankan diri dan menegaskan identitas kelompok. Karenanya, realitas keragaman etnik dan kesukuan merupakan salah satu potensi yang bisa berdampak negatif dan positif. Berdampak negatif karena keragaman kelompok etnik itu potensial untuk munculnya konflik dan kekerasan, berdampak positif karena etnisitas menggambarkan keragaman respon manusia terhadap alam sekitar yang merupakan tantangan bagi kelangsungan hidup (*survivalitas*). Tindakan-tindakan mereka dalam merespon tantangan alam telah menghasilkan keunggulan-keunggulan kompetitif, yang bisa jadi tidak dimiliki oleh kelompok lainnya di tempat yang berbeda.

Kontra narasi etnisisme dilakukan dengan menerima dan memberikan apresiasi positif terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, memperkenalkan nilai-nilai positif dari suatu kelompok etnik yang disebut sebagai *local wisdom*; mengakui kesederajatan harkat manusia beserta hak-haknya, mengembangkan tanggung jawab masyarakat dunia dan pelestarian alam. Pembentukan narasi positif berdimensi multikultur tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam program-program yang bersifat lintas etnik, pemerataan pembangunan di berbagai pelosok tanah air, apresiasi atas karya-karya unggulan dari setiap daerah, kerjasama kolaboratif antar etnik dan kelompok kesukuan untuk tujuan-tujuan nasional dan tujuan-tujuan kemanusiaan.

Pendidikan Multikultural sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme

Penanggulangan radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penguatan peran keluarga, pendidikan toleransi sejak dini,



penguatan media dan literasi digital, serta melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Selain itu, dialog antar agama dan budaya serta penegakan hukum yang tegas dan adil juga penting. Pencegahan dini melalui edukasi kreatif dan inovatif berbasis empat pilar kebangsaan juga efektif.

Berikut adalah beberapa opsi penanggulangan radikalisme:

1. Pencegahan (*Preventif*):

Keluarga berperan penting dalam membentuk karakter anak, termasuk sikap toleransi dan nasionalisme.

a. Pendidikan Toleransi Sejak Dini:

Membangun pemahaman tentang keragaman dan pentingnya hidup berdampingan sejak usia dini melalui pendidikan.

b. Edukasi Kreatif dan Inovatif:

Melibatkan metode pengajaran yang menarik dan interaktif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi.

c. Dialog Antaragama dan Budaya:

d. Menciptakan ruang dialog untuk saling memahami dan menghargai perbedaan.

e. Moderasi Beragama:

Mempromosikan sikap yang tidak ekstrem dan toleran dalam beragama.

f. Peran Tokoh Agama dan Masyarakat:

Melibatkan tokoh agama dan masyarakat yang memiliki pengaruh untuk memberikan contoh positif.

g. Penguatan Media dan Literasi Digital:

Memberikan edukasi tentang bahaya radikalisme di media sosial dan mendorong literasi digital yang positif.

h. Aksi Perdamaian:

Mengorganisir kegiatan yang mendorong perdamaian dan toleransi di masyarakat.

2. Penanganan (*Kuratif*):

a. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: Menindak tegas pelaku tindak pidana terorisme dan radikalisme.

b. Deradikalisasi: Memberikan rehabilitasi dan edukasi kepada individu yang sudah terpengaruh radikalisme.

c. Pengawasan dan Penindakan: Mengawasi penyebaran ideologi radikal di media sosial dan menindak akun-akun yang menyebarkan konten intoleran.



3. Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat:

- a. Kerjasama Platform dan Masyarakat: Menjalinkan kerjasama antara platform media sosial dan masyarakat untuk mencegah penyebaran radikalisme.
- b. Partisipasi Aktif Masyarakat: Mendorong masyarakat untuk aktif dalam menjaga keamanan dan kerukunan.
- c. Jaringan Komunitas Perdamaian: Membangun jaringan komunitas yang aktif dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi.

4. Peran Pemerintah:

- a. Penguatan Kebijakan: Mengeluarkan kebijakan yang mendukung penanggulangan radikalisme, seperti UU Pemberantasan Terorisme.
- b. Penguatan Institusi Pendidikan: Menkuatkan kurikulum pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi.
- c. Peningkatan Perekonomian:
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi potensi radikalisme yang disebabkan oleh masalah ekonomi.

5. Membangun Daya Tahan Masyarakat:

- a. Vaksin Kebangsaan: Membangun daya tahan masyarakat terhadap ideologi radikalisme dengan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila.
- b. Pendidikan Multikultural: Meningkatkan pemahaman tentang keberagaman budaya dan toleransi.

Dengan menerapkan berbagai strategi ini secara komprehensif, diharapkan radikalisme dapat ditanggulangi dan masyarakat dapat hidup rukun dan damai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research method*), yaitu sebuah analisis terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku teks, karya ilmiah, dan penelitian sebelumnya tentang topik yang terkait dengan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti melacak literatur untuk mengidentifikasi topik-topik tentang keragaman agama, keanekaragaman budaya, etnis, radikalisme, multikulturalisme, dan isu-isu lain yang terkait dengan masalah penelitian. Topik-topik yang relevan tidak hanya dirujuk dan dikutip, tetapi dianalisis, ditafsirkan,



dikontekstualisasikan, dan sebagian dikritik. Semua itu bertujuan mendapatkan wawasan mendalam tentang peran pendidikan multikultural untuk mencegah radikalisme. Setelah menganalisa dengan menggunakan metode ini, peneliti mengembangkan ide-ide berdasarkan bacaan yang diakses dan mencoba mengembangkan ide-ide baru yang terinspirasi oleh sumber yang dikonsultasikan. Didasarkan kepada fokus masalah dan metodologi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis konsep radikalisme, anti-radikalisme, dan counter-radikalisme; (2) Mengembangkan konsep multikulturalisme sebagai kontra narasi radikalisme; (3) Mensintesis gagasan atau konsep multikulutralisme dari perspektif studi agama untuk tujuan kerukunan beragama.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Dengan penelitian mengungkapkan bahwa dengan semakin bertambahnya sarana dan media yang digunakan oleh kelompok radikal untuk penyebaran paham radikalisme dan untuk rekrutmen anggota gerakan radikal, maka semakin besar peluang orang-orang, khususnya kalangan generasi muda yang melek teknologi informasi, terpapar paham ini. Media internet, terutama media sosial, adalah media yang paling disukai dan sering digunakan masyarakat sekarang untuk berkomunikasi. Kelompok radikal cepat menangkap peluang ini dan mereka juga amat cepat dan pandai menguasai dan memanfaatkan sarana teknologi informasi ini sehingga penyebaran paham radikalisme dan rekrutmen calon anggota menjadi semakin masif.

Maka, untuk menangkal sikap radikal, perlu dilakukan kontra radikalisme melalui propaganda anti radikalisme, pembentukan opini tentang bahaya sikap radikal, dan pembentukan narasi lainnya sebagai upaya menangkal radikalisme. Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan bahwa sikap tidak dibawa sejak lahir. Tidak ada orang yang sejak lahir radikal. Sikap radikal itu dipelajari, dibentuk oleh pengalaman, pengasuhan, pendidikan, atau pelatihan. Karena itu, secara teoretik, sikap radikal bisa diubah, dikurangi, atau dihilangkan melalui proses pengalaman, pengasuhan, pendidikan, atau pelatihan, dengan metode dan teknik yang sengaja dibuat untuk mengubah sikap. Jika memperhatikan pendapat tersebut, maka jelas bahwa setiap orang berpeluang untuk membentuk sikap seseorang agar tidak



menjadi radikal melalui banyak cara. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap pihak sebagai upaya pencegahan radikalisme.

Membangun kontra narasi radikalisme mensyaratkan pemahaman komprehensif terhadap narasinarasi radikalisme yang dibangun oleh pelakunya. Narasi radikalisme keagamaan dibangun oleh beberapa aspek, di antaranya klaim-klaim kebenaran eksklusif yang didasarkan kepada pemahaman mereka terhadap teks keagamaan, janji-janji masa depan sebagaimana tertuang dalam teks, romantisme masa lampau, dan kekaguman terhadap tokoh atau pemimpin idola. Oleh karena itu, pengkajian terhadap sumber-sumber rujukan agama, baik kitab suci, pernyataan para pendiri agama, tokoh dan pemimpin agama berpengaruh dan dikagumi, maupun institusi-institusi otoritatif yang menerbitkan fatwa-fatwa yang menjadi pegangan kelompok radikal menjadi penting. Di sini kita dapat memahami, mengkritisi, dan membanding argumen-argumen yang dibangun. Selanjutnya, kita mengajukan narasi baru kontra radikalisme.

Klaim kebenaran seorang penganut yang didasarkan kepada pemahaman terhadap teks keagamaan pada dasarnya tidak ada masalah, sepanjang ia tidak menggunakannya untuk menilai orang lain (*value judgment*). Dalam posisi itu, truth claim tidak akan menimbulkan pelecehan terhadap klaim kebenaran orang lain yang berbeda dengannya karena truth claim dan value judgment terhadap kebenaran orang lain adalah dua hal yang berbeda. Memang ada pandangan bahwa truth claim merupakan sebab musabab timbulnya konflik antar umat beragama, akan tetapi pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Seorang pemeluk tentu memiliki klaim atas kebenaran agamanya, tetapi ia harus mampu menahan diri untuk tidak menilai kebenaran agama orang lain berdasarkan kepada standar kebenaran agama yang dianutnya.

KESIMPULAN

Problem sosial yang disebabkan oleh radikalisme agama dan etnik dalam masyarakat multikultur di Indonesia sudah sedemikian jelas dapat dirasakan. Ancaman disintegrasi yang disebabkan oleh tindakan radikal kelompok-kelompok tersebut juga telah nyata. Hal itu menuntut semua pihak untuk dapat meminimalisir dan menghilangkan radikalisme atas nama agama dan sentimen etnik serta mendorong berkembangnya peran-peran positif agama dan etnisitas dalam masyarakat multikultur Indonesia. Semua komponen bangsa ini dituntut untuk terlibat dalam upaya-upaya positif



membangun bangsa dari unsur-unsur yang beraneka ragam. Tindakan radikal didasari oleh pemikiran yang eksklusif dan paham radikalisme. Karena bermula dari pemikiran dan pemahaman, maka pencegahan sikap dan tindakan radikalisme harus dimulai dari pemikiran yaitu dengan melakukan pengkajian atas pandangan-pandangan mereka dan melakukan kontra narasi atas paham radikalisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokohnya. Di sini kita dituntut untuk melakukan kritik atas pemahaman-pemahaman tekstual yang eksklusif, penilaian terhadap orang lain yang didasarkan kepada klaim kebenaran pribadi, dan prasangka terhadap segala sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Kontra narasi yang dibangun tentu saja harus lebih kuat, lebih bernas dengan argumentasi yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Abdullah, S. (2014) „Social Conflict Management through Multicultural Approach and Policy in Preventing and Overcoming the Social Disintegration“, *Tawarikh*, 5(2).
- 2) Alba, R. D. (1992) „Ethnicity“, in Borgatta, E. F. and Borgatta, M. L. (eds) *Encyclopaedia of Sociology*. New York: MacMillan Publishing Company.
- 3) Amador, J. S. (2011) „ASEAN Socio-Cultural Community: An Assessment of its Institutional Prospects“, *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.1803830.
- 4) Ansor, M. (2013) „“We Are from the Same Ancestor“: Christian-Muslim Relations in Contemporary Aceh Singkil“, *Al-Albab: Borneo Journal of religious Studies*, 3(1), pp. 3–24.
- 5) Baidhawiy, Z. (2007) „Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: an alternative for contemporary Indonesia“, *British Journal of Religious Education*, 29(1), pp. 15–30. doi: 10.1080/01416200601037478.
- 6) Banks, J. A. and Banks, C. M. (2001) *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Francisco: Jossey-Bass.



- 7) Basyir, K. (2014) „Menimbang Kembali Konsep dan Gerakan Fundamentalisme Islam di Indonesia“, *AlTahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(1), pp. 23–45.
- 8) Bergesen, A. J. and Lizardo, O. (2004) „International terrorism and the world-system“, *Sociological Theory*. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 22(1), pp. 38–52.
- 9) Bond, M. H. (1998) „Unity in diversity: Orientations and strategies for building a harmonious, multicultural society“, *Trames*. Estonian Academy Publishers, 2, pp. 234–263.
- 10) Bräuchler, B. (2003) „Cyberidentities at war: religion, identity, and the Internet in the Moluccan conflict“, *Indonesia*. JSTOR, (75), pp. 123–151.
- 11) Buendia, R. G. (2005) „The state-Moro armed conflict in the Philippines Unresolved national question or question of governance?“, *Asian Journal of Political Science*. Taylor & Francis, 13(1), pp. 109–138.
- 12) Buendia, R. G. (2007) *The Politics of Ethnicity and Moro Secessionism in the Philippines*. Perth: Murdoch University and Asia Research Centre.
- 13) Burhanuddin, N. (2016) „Akar dan Motif Fundamentalisme Islam: Reformulasi Tipologi Fundamentalisme dan Prospeknya di Indonesia“, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), pp. 199– 210. doi: 10.15575/jw.v1i2.831.
- 14) Chaulia, S. (2014) *Politics of the global economic crisis: regulation, responsibility and radicalism*. London: Routledge.
- 15) Das, N. K. (1989) *Ethnic identity, ethnicity and social stratification in north-east India*. Inter-India Publications.
- 16) Fadly, M. A. (2016) „Gerakan Radikalisme Agama; Perspektif Ilmu Sosial“, *El-Hikam*, 9(1), pp. 63–80.
- 17) Golose, P. R. (2015) *Invasi Terorisme ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- 18) Grant, C. A. and Portera, A. (2010) *Intercultural and multicultural education: Enhancing global interconnectedness*. London: Routledge.
- 19) Guadagno, R. E. et al. (2010) „Social influence in the online recruitment of terrorists and terrorist sympathizers: Implications for social



psychology research“, *Revue internationale de psychologie sociale. Presses universitaires de Grenoble*, 23(1), pp. 25-56.

- 20) Gudeman, R. H. (2002) „Multiculturalism in Malaysia: Individual harmony, group tension“, *Macalester International*, 12(1), p. 16.
- 21) Hafid, W. (2020) „Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal)“, *AlTafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), pp. 31-48.

